

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsisten dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 (UU No. 23), sebagaimana telah diubah. Menandakan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan untuk memfasilitasi percepatan terwujudnya kemakmuran bersama melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warganya, dan daya tarik sumber keuangan dari luar negeri, sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip demokrasi, antar- solidaritas nasional, standar perburuhan, dan ciri khas lain dari kawasan ini. Fungsi pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab yang seolah-olah demokratis didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tersebut bila memungkinkan. Pejabat pemerintah daerah, sering dikenal sebagai "pemerintah", adalah tulang punggung pemerintahan yang dilimpahkan, atau "otonomi", di mana kekuasaan dialihkan dari pemerintah pusat ke negara bagian. Otonomi daerah mengakui hak masyarakat untuk membuat pilihan mereka sendiri tentang isu-isu pemerintahan dan kesejahteraan warga. Keberhasilan desentralisasi kekuasaan di inti perkotaan dan pinggiran kota dapat diukur dengan jumlah uang yang ditransfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten (PEMDA). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Ini merupakan indikasi keberhasilan desentralisasi kekuasaan di inti pedesaan dan perkotaan ketika dana ditransfer dari pemerintah pusat ke PEMDA. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan lebih baik. Keberhasilan desegregasi kewenangan di inti pedesaan dan perkotaan dapat diukur dengan jumlah uang yang dikirim dari pemerintah pusat ke PEMDA. Pelaksanaan

otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah.

Penerimaan daerah adalah masuknya dana ke kas daerah pada saat dilakukan desentralisasi pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah daerah dikenal sebagai "pendapoatan", dan diakui secara luas sebagai penyumbang kemakmuran ekonomi jangka panjang. Perlu dicatat bahwa pinjaman ini mencakup semua yang masih terutang dalam hal pembayaran atau penggantian, apakah itu untuk tahun fiskal saat ini atau yang berikutnya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Persamaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Negara Bagian untuk tahun 2004, "pendaoatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, Tahun 2004.

Pemerintah daerah mengandalkan pendapatan pajak dan bentuk pendapatan lain yang dihasilkan dalam yurisdiksi mereka untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sumber pendapatan daerah yang sah termasuk pajak yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah, serta pengelolaan aset yang didanai publik. Peneliti Juniawan, MA, dan Suryantini, NP, 2018, melaporkan menemukan korelasi positif antara pendapatan per kapita lokal dan pengeluaran konsumen untuk barang tahan lama.

Pemerintah daerah akan lebih mungkin untuk mengejar inisiatif untuk mendiversifikasi dan memperluas aliran pendapatan mereka jika mereka melihat peningkatan pendapatan pajak daerah (dikenal sebagai "pendaptan asli daerah"), karena ini adalah salah satu sumber utama pendanaan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melayani konstituen mereka, dan salah satu cara mereka dapat melakukannya adalah dengan memberikan pelayanan publik yang sangat baik dengan imbalan uang pajak. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat yang telah memberikan kontribusi besar bagi kas pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memastikan bahwa penduduk memiliki akses

makanan dan perawatan medis yang cukup di wilayah tersebut. Pengeluaran tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal tahunan (CAPEBD) APBD sebagai item baris oelh. Sekalipun ada korelasi antara PAD dan belanja investasi, tidak semua daerah berpenghasilan tinggi memiliki ekspansi ekonomi yang sama kuatnya.

Dana tetap adalah uang dari APBN daerah yang disalurkan melalui tiga cara: dana bahi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selain yang dinyatakan secara eksplisit, tujuan pendanaan per kapita adalah untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan sumber daya mereka sendiri, yang pada gilirannya membantu pemerintah pusat mendanai pemerintah daerah dengan lebih baik dan mengurangi pembayaran transfer antar pemerintah.

Dana yang dialokasikan melalui proses alokasi terpusat APBN dikenal sebagai "dana alokasi umum," atau "dana alokasi," dan digunakan untuk menyamakan sumber keuangan daerah dan memenuhi kebutuhan staf dan peralatan prakarsa desentralisasi. Konsekuensi dari penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat dalam bentuk peningkatan belanja barang dan jasa publik, yang dikenal sebagai “dana perimbangan keuanan”, dan dalam bentuk beban pajak umum yang lebih tinggi (Baldirc Siregar, 2017:87).

Kebutuhan utama untuk transfer ini adalah bahwa yurisdiksi penerima memiliki kebijaksanaan penuh atas bagaimana dana tersebut digunakan, sesuai dengan nilai-nilai yurisdiksi penerima sendiri dan undang-undang yang mengatur apa yang merupakan prioritas dalam yurisdiksi tersebut. Keputusan Menteri Keuangan No. 10/KM.7/2020 (KMK NO. 10/2020). Penundaan DAU yang dikenakan kepada: Saya pemda yang belum memberikan laporan APBD, serta (ii) pemerintah daerah yang sudah memberikan lappran APBD nemun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK NO. 35/2020, berdasarkan kriteria sebaai berikut:

Salah satu hal yang membantu menjaga keseimbangan adalah alokasi dana khusus, atau khusus alokasi dana, yang berasal dari APBN dan diberikan kepada pemerintah daerah sehingga dapat mendanai inisiatif

khusus yang menjadi prioritas daerah dan nasional. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban keuangan inisiatif khusus pada pemerintah. DAKialah uang yang bersumber dari dsri pendaptan APBN yang dialokasikan ke wilayah untuk mengelola dana kegiatan khusus, artinya uruan daerah denan prioritas nasional, yang diingat oleh APBN (Rachim, 2015). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tentang Dokumen Standar Akuntansi (PMK/BAS), belanja modal didefinisikan sebagai .

Menurut (Susanti & Fahlevi, 2016), investasi dikategorikan baik pembelian tanah, pembelian peralatan, pembelian infrastruktur jalan dan air, pembelian bangunan dan konstruksi, atau jenis investasi fisik lainnya. Pembayaran yang dilakukan untuk pemeliharannya berfungsi sebagai kontribusi kepada pokok dana. Uang dari anggaran belanja modal APBD digunakan oleh Pemda untuk menambah aset tetap. Pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, membangun fasilitas untuk menarik investasi lokal dan internasional, menyediakan perumahan dengan harga terjangkau, dan membersihkan penyakit adalah prioritas bagi pemerintah, yang mengalokasikan sebagian dari anggarannya sesuai dengan itu.

Meskipun banyak orang yang datang dan menetap di Jawa Barat dari suku bbangsa yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah metropolitan Jakarta, provinsi ini masih diakui secara luas sebagai pusat budaya Sunda dan sering dianggap sebagai bagian dari budaya Sunda. tanah air Sunda. Provinsi Jawa Barat masing-masing terdiri dari 18 kabupaten, 9 kotamdy, 627 kecamatan, 645 kecamatan, dan 5.312 desa. Dengan proyeksi populasi 44 juta pada tahun 2017, dan luas daratan 35.377 kilometer persegi, ini adalah salah satu negara terpadat di dunia. Lebih dari 16% dari populasi dunia pada tahun 2003 tinggal di Indonesia, yang memiliki populasi sedikit di atas 37 miliar orang. Tingkat urbanisasi di provinsi ini meningkat pesat, khususnya di JABODETABEK (kurang lebih Jakarta). Sebanyak 15, 7 juta orang di Jawa Barat mengenyam pendidikan tinggi pada tahun 2001, membuat sekitar 18 persen dari keseluruhan angkatan kerja terdidik di negara ini. Sebagian besar pekerja bekerja di sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan (31%), diikuti oleh manufaktur (17%), grosir dan eceran (22,5%), dan layanan pelanggan (29 persen).

Selama hampir tiga dekade sekarang, ekonomi Jawa Barat terus tumbuh. Pertumbuhan di sektor manufaktur dan penyedia layanan ekonomi saat ini merupakan indikasi yang jelas dari kesehatan ekonomi kontemporer yang kuat. Selain kemajuan sosial dan intelektual, industri manufaktur non-pertambangan di sekitar Jawa Barat telah menjadi sumber utama investasi dan produksi, dengan bagian yang sama besar dari output ekonomi daerah dikreditkan ke sektor-sektor ini. Pada tahun 2003, PDB Provinsi Jawa Barat mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 231,764 miliar (US\$27,26 miliar), yang merupakan 14-15 persen dari keseluruhan PDB negara. PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp 5.476.034 (US\$644.24) termasuk minyak dan gas, ini mendeskripsikan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional,

Provinsi Jawa Barat memiliki basis manufaktur yang sangat terkonsentrasi di berbagai sektor, termasuk elektronik, industri tekstil, sektor pengolahan makanan, sektor furnitur dan perabotan, serta industri pasir dan batu. Selain itu, lahan panas, produksi minyak dan gas, dan industri petrokimia semuanya dapat ditemukan di bagian barat Jawa ini. Penyumbang PDRB terbesar di Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan (36,72%), sektor perhotelan dan transportasi (14,45%), dan sektor pertanian (11,65%). Sementara daerah lain telah menjadi sentra produksi tekstil tradisional, Jawa Barat telah muncul sebagai pusat produksi tekstil kontemporer dan pakaian nasional. Hampir seperempat dari seluruh nilai produksi non-migas Indonesia diekspor dari Jawa Barat. Besi baja, alas kaki, furnitue, rotan,

Di daerah ini, yang dikenal sebagai salah satu "lambung padis" paling produktif di negara ini, lebih dari 23 persen dari seluruh wilayah, atau 29,3 juta kilometer persegi, didedikasikan untuk produksi beras. Tidak diragukan lagi bahwa provinsi Jawa Barat adalah "pabrik" perekonomian Indonesia; produk pertanian wilayah Jawa Barat menyumbang 15 persen dari keseluruhan hasil pertanian negara. Hasil hutan pangan Jawa Barat antara lain beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta

bumbu dan rempah-rempah. Hasil panen mereka menghasilkan 124.000 ekor sapi ternak, atau 34% dari total nasional.

Dengan garis pantai lebih dari seribu kilometer, bagian barat anak benua India berhadapan langsung dengan bagian timur anak benua India dan perairannya yang berbahasa Jawa. Provinsi Jawa Barat berdasarkan letak geografisnya memiliki potensi gerak yang sangat besar. Sebuah rencana rinci sekarang sedang dilaksanakan untuk memperluas Pelabuhan Cirebon baik sebagai kota satelit yang melayani Tanjung Priok, Jakarta, atau sebagai kota satelit yang melayani daerah pinggiran Jawa Barat dan dilengkapi dengan industri pinggiran kota di wilayah tersebut. Potensi ventilasi pesisir timur tidak hanya berasal dari jumlah sungai yang mengalir melalui Jawa Barat; itu juga berasal dari pembangunan waduk besar air di Cirata dan DAM Jatiluhur, yang tidak hanya menghasilkan listrik mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota Jawa Barat?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota Jawa Barat?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan suatu informasi mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal.

2. Manfaat Akademis dan Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat menjadi manfaat serta memberikan pengetahuan dan menjadi referensi bacaan dari penelitian tersebut untuk lebih mengerti perihal pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal.